

POTENSI KELEMBAGAAN PERTANIAN UNTUK Mendukung Pembangunan Pertanian DI Wilayah Tujuh Kabupaten Sukabumi

Reny Sukmawani¹, Endang Tri Astutiningsih², Eliesa Zahra Septiani³, Neng Elmi Salehah⁴

^{1,2,3}Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl. R. Syamsudin SH No. 50 Sukabumi

⁴Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor

email : renysukmawani@ummi.ac.id

ABSTRAK

Setiap daerah hendaknya dapat mengembangkan lini produksi, pendistribusian, dan sumberdaya yang dapat bersaing sehingga perlu untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi potensi kelembagaan pertanian sehingga diharapkan Kabupaten Sukabumi mampu mengoptimalkan potensi kelembagaan ini dalam meningkatkan pembangunan pertanian. Berdasarkan tingkat eksplanasinya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pertanian di Kabupaten Sukabumi terdiri dari Kelembagaan petani, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan keuangan dan kelembagaan pemasaran dengan kondisi yang beragam dan masing-masing memiliki fungsi serta peranan yang berbeda dilihat dari potensinya. Berdasarkan hasil identifikasi potensi pada kelembagaan pertanian tersebut, perlu dikaji lebih mendalam untuk merancang model strategi peningkatan potensinya sehingga mampu memaksimalkan peningkatan pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci: Potensi, Kelembagaan, Pertanian

PENDAHULUAN

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh negara, tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun (2004), mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka identifikasi potensi wilayah sudah sepatutnya dilaksanakan dalam aspek pembangunan di Indonesia. Proses pengembangan suatu wilayah diperlukan perencanaan yang sangat matang dan benar-benar terstruktur. Salah satu cara untuk membuat perencanaan pembangunan wilayah yaitu dengan melakukan identifikasi potensi wilayah yang dapat memaksimalkan potensi wilayah tersebut untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Potensi wilayah berperan sebagai pendorong yang produktif, maka dari itu, proses pengembangan wilayah pertanian hendaknya didasarkan pada potensi pertanian yang ada pada suatu wilayah untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan dalam pemetaan strategi pengembangan wilayah. Menurut Sadali et al., (2020), pemetaan potensi wilayah mampu memberikan alternatif solusi dalam pengembangan sumberdaya lokal baik fisik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 (2004), tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu setiap daerah diharuskan untuk dapat mengembangkan lini produksi, pendistribusian, dan sumberdaya yang dapat bersaing. Agar hal tersebut dapat terwujud, setiap daerah perlu terus menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada, sehingga mampu bertumpu pada potensi lokal yang dapat dikembangkan oleh masyarakatnya dalam pengelolaan potensi di wilayah tersebut baik berupa potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia. Identifikasi wilayah dengan basis kelembagaan merupakan suatu langkah awal untuk mengetahui keadaan dan aktivitas dari kelembagaan yang ada.

Menurut Septiani (2023), pengembangan kelembagaan di suatu daerah bertujuan untuk menjadi wadah pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Karena kelembagaan merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan suatu daerah. Adanya

kelembagaan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah, karena keberadaan kelembagaan sangat dibutuhkan dalam kehidupan.

Kelembagaan pertanian merupakan salah satu subsektor yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengetahui potensi dalam pengembangan kawasan pertanian. Kelembagaan pertanian juga merupakan aspek yang potensial karena mempunyai peranan penting dalam proses pengembangan Kawasan pertanian. Kelembagaan pertanian berperan sebagai regulator dalam berbagai kegiatan di bidang pertanian seperti promosi teknologi pertanian, pengembangan usaha pertanian, pembiayaan pertanian dan pemasaran produk pertanian. Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi kelembagaan dapat menjadi basis dan potensi untuk pengembangan wilayah pertanian. Dengan mengetahui potensi kelembagaan pertanian maka perencanaan pengembangan pertanian pada suatu wilayah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menurut Rusandi & Muhammad Rusli (2021), penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Objek penelitian ini adalah kelembagaan pertanian. Berdasarkan jenis data yang dikumpulkannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif. Adapun wilayah penelitian adalah wilayah tujuh Kabupaten Sukabumi yang meliputi Kecamatan Tegalbuleud, Cidadak, Cidolog, Curugkembar, Sagaranten dan Pabuaran yang dilaksanakan dari bulan Oktober 2023 sampai bulan Februari tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah sektor pertanian yang luas. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi (2023), sektor pertanian memiliki nilai persentase PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha tahun 2022 tertinggi sebesar 22,61%. Wilayah tujuh Kabupaten Sukabumi terdiri dari enam kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Cidadak, Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Curugkembar dan Kecamatan Pabuaran yang memiliki luas wilayah 11,67% dari total luas keseluruhan Kabupaten Sukabumi. Dilatarbelakangi oleh pengembangan wilayah, maka setiap daerah perlu mengidentifikasi potensi yang ada di wilayahnya untuk kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan potensi yang dapat dikembangkan pada tahap selanjutnya dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat setiap wilayah.

Sektor pertanian sebagai sektor terbesar di Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa aspek potensial yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah aspek kelembagaan pertanian. Di wilayah tujuh teridentifikasi memiliki beberapa kelembagaan pertanian, yang kemudian dari hasil identifikasi potensi aspek-aspek tersebut dapat dilakukan tindak lanjut sebagai penentu instrumen potensial dalam proses pengembangan wilayah. Dikutip dari Septiani, (2023) kelembagaan pertanian dan seluruh kelembagaan yang tercakup merupakan lembaga yang berperan sebagai pendukung dan penyedia segala kebutuhan yang mendorong pembangunan sektor pertanian. Setiap kelembagaan pertanian didalamnya teridentifikasi juga kelembagaan lainnya seperti kelembagaan pendidikan, kelembagaan layanan informasi, kelembagaan sosial dan ekonomi (Meilani et al., 2023).

a. Kelembagaan Petani

Menurut Darwanto dkk dalam (Sihombing, 2023), kelembagaan petani memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan pertanian selain itu kelembagaan petani juga memudahkan pemerintah dalam proses pemberian fasilitas untuk petani dalam melakukan usahatani. Yang termasuk kedalam kelembagaan petani diantaranya kelompok tani, gabungan kelompok tani dan asosiasi komoditas petani. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, kelembagaan petani yang ada di wilayah tujuh

hanya terdapat kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Berikut data kelompok tani dan gapoktan yang teridentifikasi di wilayah tujuh Kabupaten Sukabumi yang akan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Kelembagaan Petani di Wilayah Tujuh Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	Kelembagaan Petani	Ketersediaan	Kondisi
1.	Tegalbuleud	Kelompok tani	Tegalbuleud memiliki 234 kelompok tani	Sejumlah kelompok tani tersebut aktif, dari jumlah tersebut terdapat 158 kelas pemula, 66 kelas lanjut, 10 kelas madya, belum ada kelas utama.
		Gabungan Kelompok tani	Tegalbuleud memiliki 8 Gapoktan	Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah desa di Tegalbuleud.
		Asosiasi Komoditas Petani	-	Belum ada data resmi yang menyajikan.
2.	Cidolog	Kelompok tani	Cidolog memiliki 80 kelompok tani	Jumlah kelompok tani tersebut aktif, jumlah tersebut terdiri dari 51 kelas pemula, 23 kelas lanjut, 6 kelas madya, dan 0 kelas utama.
		Gabungan Kelompok tani	Cidolog memiliki 5 gapoktan	Jumlah tersebut sama dengan jumlah desa.
		Asosiasi Komoditas Petani	-	Belum ada data resmi yang menyajikan.
3.	Cidadap	Kelompok tani	Cidadap memiliki 61 kelompok tani	Jumlah tersebut aktif, terdapat 44 kelas pemula, 13 kelas lanjut, 4 kelas madya, belum ada kelas utama
		Gabungan Kelompok tani	Cidadap memiliki 6 gapoktan	Jumlah tersebut sama dengan jumlah desa.
		Asosiasi Komoditas Petani	-	Belum ada data resmi yang menyajikan.
4.	Sagaranten	Kelompok tani	Sagaranten memiliki 101 kelompok tani	Jumlah tersebut aktif, terdapat 39 kelas pemula, 42 kelas lanjut, 20 kelas madya, belum ada kelas utama.
		Gabungan Kelompok tani	Sagaranten memiliki 12 gapoktan	Jumlah tersebut sama dengan jumlah desa.
		Asosiasi Komoditas Petani	-	Belum ada data resmi yang menyajikan.
5.	Curugkembar	Kelompok tani	Curug kembar memiliki 71 kelompok tani	Jumlah tersebut aktif, terdiri dari 22 kelas pemula, 28 kelas lanjut, 20 kelas madya, 1 kelas utama.
		Gabungan Kelompok tani	Curug kembar memiliki 7 gabungan kelompok tani	

		Asosiasi Komoditas Petani	-	Belum didapati data nama asosiasi di wilayah tujuh.
6.	Pabuaran	Kelompok tani	Pabuaran memiliki 94 kelompok tani	Terdiri dari 29 kelas pemula, 54 kelas lanjut, 11 kelas madya, 0 kelas utama.
		Gabungan Kelompok tani	Pabuaran memiliki 7 gapoktan	Jumlah tersebut sama dengan jumlah desa
		Asosiasi Komoditas Petani	-	Belum didapati data nama asosiasi di wilayah tujuh.

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi (diolah), 2024

Pada Tabel 1 terlihat kondisi berdasarkan ketersediaan kelembagaan petani di wilayah tujuh Kabupaten Sukabumi. Diketahui Kecamatan Tegalbuleud memiliki kelompok tani terbanyak yaitu 234 kelompok tani. Sedangkan Kecamatan Cidadap memiliki jumlah kelompok tani paling sedikit yaitu 61 kelompok tani. Adapun jumlah Gapoktan sesuai dengan jumlah desa di setiap kecamatan karena satu gapoktan hanya tersedia di setiap satu desa. Menurut BPP Kecamatan Cidadap, asosiasi komoditas pertanian terdapat di tingkat kabupaten, dan setiap jenis komoditas memiliki asosiasi petani. Saat ini, belum ada data resmi yang menyajikan terkait nama-nama asosiasi dan jumlah petani yang tergabung kedalam asosiasi komoditas pertanian di wilayah tujuh Kabupaten Sukabumi. Kelembagaan petani di wilayah tujuh memiliki aksesibilitas kelembagaan yang baik bagi petani ditandai dengan banyak tersedianya kelompok tani dan gapoktan juga asosiasi komoditas pertanian yang menghimpun petani komoditas pertanian. Kelompok tani dikelompokkan kembali menurut kelas kemampuannya. Kelas tersebut merepresentasikan kemampuan kelompok tani melalui nilai yang kelompok tani peroleh ketika menjawab pertanyaan.

Menurut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, adanya kelas pada kelompok tani berdasarkan aspek penilaian yang dilakukan sebelumnya kepada masing-masing kelompok tani, semua kelompok tani yang terdata pada Tabel 1 memiliki status yang aktif. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui juga bahwa di wilayah tujuh Kabupaten Sukabumi masih di dominasi oleh kelompok tani kelas pemula yang berarti, perlu dilakukan penguatan dengan cara meningkatkan kemampuan pada setiap anggota kelompok tani untuk tergabung kedalam gabungan kelompok tani agar dapat mengikuti kegiatan penyuluhan dan saling bertukar informasi bersama kelompok tani lainnya.

b. Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan merupakan kelembagaan yang bertugas sebagai fasilitator, sarana informasi terkait teknologi sampai dengan cara memasarkan produk pertanian. Di Wilayah tujuh teridentifikasi memiliki kelembagaan penyuluhan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dibawah Dinas Pertanian, yang berada di tingkat kecamatan dan di setiap kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peternakan dan UPTD Pertanian. Lebih jelasnya akan disajikan ketersediaan kelembagaan penyuluhan di Wilayah tujuh pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Kelembagaan Penyuluhan di Wilayah Tujuh Kabupaten Sukabumi.

No.	Kecamatan	Ketersediaan			Kondisi
		BPP	UPTD Peternakan	UPTD Pertanian	
1.	Tegalbuleud	Tegalbuleud memiliki 1 BPP.	UPTD Peternakan teridentifikasi 1 setiap wilayah. Di	UPTD Pertanian teridentifikasi 1 setiap wilayah. Di wilayah tujuh yaitu	Setiap kecamatan memiliki 1 BPP
2.	Cidolog	Cidolog memiliki 1 BPP.	teridentifikasi 1 setiap wilayah. Di	setiap wilayah. Di wilayah tujuh yaitu	memiliki 1 BPP

3.	Cidadap	Cidadap memiliki 1 BPP.	wilayah tujuh yaitu UPTD Peternakan	UPTD Pertanian Wilayah VII	yang berada di tingkat
4.	Sagaranten	Sagaranten memiliki 1 BPP.	Wilayah VII Sagaranten.	Sagaranten	kecamatan, memiliki UPTD
5.	Curugkembar	Curugkembar memiliki 1 BPP.			Peternakan dan UPTD Pertanian
6.	Pabuaran	Pabuaran memiliki 1 BPP.			yang tersedia 1 di setiap wilayah.

Sumber: Dinas Pertanian dan UPTD Peternakan Wilayah VII Sagaranten (diolah), 2024

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa kelembagaan penyuluhan UPTD Peternakan dan UPTD Pertanian hanya memiliki 1 unit di setiap wilayah Kabupaten Sukabumi. Di Wilayah tujuh UPTD Peternakan dan UPTD Pertanian berada di Kecamatan Sagaranten. Menurut UPTD Peternakan Wilayah VII Sagaranten, UPTD dan BPP memiliki perbedaan, yaitu jika BPP memiliki penyuluh pertanian sedangkan UPTD tidak memiliki penyuluh. UPTD Peternakan Wilayah VII Sagaranten berbentuk PUSKESWAN (Pusat Kesehatan Hewan) yang melayani penanganan penyakit maupun perawatan hewan, baik hewan ternak ataupun hewan peliharaan. BPP di Wilayah tujuh merupakan kelembagaan yang berada di bawah naungan dan pengawasan UPTD Pertanian Wilayah VII Sagaranten. UPTD Pertanian dapat melakukan pelatihan terhadap penyuluh-penyuluh di BPP agar dapat terbentuk peningkatan terhadap kinerja penyuluhan pertanian.

Ketersediaan kelembagaan penyuluhan yang disajikan pada Tabel 2 memiliki aksesibilitas yang mudah. Dari segi kinerja, BPP dan UPTD sama-sama berperan sebagai fasilitator yang memberikan informasi mengenai pertanian dan peternakan. Penyuluh BPP melakukan kegiatan penyuluhan terjadwal yang disepakati oleh penyuluh dan gapoktan, penyuluh menyalurkan informasi mengenai pertanian dari mulai teknologi sampai dengan cara memperluas jangkauan pemasaran hasil produksi. UPTD Peternakan mengadakan kegiatan yang dapat dihadiri oleh masyarakat. Kegiatan tersebut membahas mengenai cara pencegahan penyakit pada hewan, informasi mengenai ciri-ciri penyakit pada hewan, pelayanan kesehatan hewan gratis sampai vaksinasi pada hewan ternak dan peliharaan.

c. Kelembagaan Keuangan

Kelembagaan keuangan berperan sebagai fasilitator dana untuk keperluan masyarakat seperti alokasi dana permodalan, pinjaman, tabungan dan lainnya. Kelembagaan keuangan menawarkan produk kredit modal bagi petani untuk menjalankan usahatani. Menurut Veronica, (2018), sumber permodalan yang berasal dari lembaga keuangan lebih mudah di akses oleh golongan petani yang memiliki lahan luas. Sedangkan petani yang tergolong menengah kebawah memiliki akses yang kurang leluasa, khususnya petani yang memiliki lahan <1 Ha, karena secara administrasi untuk mendapatkan kredit permodalan perlu memiliki jaminan yang kuat, dan kepercayaan pihak perbankan. Di wilayah tujuh terdapat kelembagaan keuangan yang resmi (perbankan) dan semi-resmi (koperasi). Berikut data kelembagaan keuangan yang terdapat di wilayah tujuh.

Tabel 3. Data Kelembagaan Keuangan di Wilayah Tujuh Kabupaten Sukabumi.

No.	Kecamatan	Kelembagaan Keuangan	Ketersediaan	Kondisi
1.	Tegalbuleud	Bank Koperasi	Tegalbuleud memiliki 1 unit bank. Tegalbuleud memiliki 36 unit koperasi	Tegalbuleud memiliki 1 bank aktif, dan 36 unit koperasi yang terdiri 12 jenis konsumen, 11 produsen 4 simpan pinjam.

2.	Cidolog	Bank Koperasi	Cidolog memiliki 1 unit bank Cidolog memiliki 22 unit koperasi.	Cidolog memiliki 1 unit bank aktif jenis bank perkreditan rakyat dan koperasi yang terdiri dari 8 jenis konsumen, 7 produsen, 1 pemasaran, 6 simpan pinjam.
3.	Cidadap	Bank Koperasi	Cidadap memiliki 1 unit bank Cidadap memiliki 11 unit koperasi	Cidadap memiliki 1 unit bank jenis bank umum swasta dan 11 koperasi yang terdiri dari 5 konsumen, 6 produsen,
4.	Sagaranten	Bank Koperasi	Sagaranten memiliki 4 unit bank. Sagaranten memiliki 37 unit koperasi.	Sagaranten memiliki 4 unit perbankan diantaranya 3 unit bank umum, 1 unit bank perkreditan rakyat, dan 37 koperasi yang diantaranya 26 jenis konsumen, 6 jenis produsen, 1 pemasaran, dan 4 simpan pinjam.
5.	Curugkembar	Bank Koperasi	Curugkembar memiliki 1 unit bank. Curugkembar memiliki 9 unit koperasi	CurugKembar memiliki 1 unit bank perkreditan rakyat, dan memiliki 9 unit koperasi dengan jenis 4 konsumen, 3 produsen, dan 2 simpan pinjam.
6.	Pabuaran	Bank Koperasi	Pabuaran memiliki 1 unit bank. Pabuaran memiliki 11 unit koperasi	Koperasi di Pabuaran 6 konsumsi, 5 produsen.

Sumber: BPS: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2023 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 3, diketahui masyarakat di wilayah tujuh cenderung lebih banyak menggunakan layanan kelembagaan keuangan koperasi dibandingkan perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah perbankan di Kecamatan Tegalbuleud, Cidolog, Cidadap, Curugkembar dan Pabuaran hanya terdapat 1 unit perbankan. Kecauli di Kecamatan Sagaranten yang memiliki 4 unit bank. Sedangkan, lembaga koperasi di setiap kecamatan memiliki jumlah unit yang lebih banyak dibandingkan perbankan. Ketersediaan kelembagaan keuangan di setiap kecamatan di wilayah tujuh menandakan adanya penggerak ekonomi di wilayah tersebut.

d. Kelembagaan Pemasaran

Kelembagaan pemasaran merupakan salah satu jenis kelembagaan pertanian yang berperan sebagai penyalur produk ke pasar hingga sampai ke konsumen. Menurut BPP Cidadap, di wilayah tujuh Kabupaten Sukabumi memiliki kelembagaan pemasaran yang termasuk kedalam kepemilikan individu atau perorangan diantaranya adalah petani-petani yang tergabung kedalam kelompok tani yang ada di wilayah tujuh Kabupaten Sukabumi berperan sebagai produsen yang menghasilkan produk pertanian. Setelah itu, produk hasil pertanian dapat dibeli secara keseluruhan oleh pedagang ke pedagang lain, biasanya seringkali disebut pedagang pengumpul/tengkulak. Kemudian dijual kembali ke pedagang besar dan produk hasil pertanian didistribusikan melalui pedagang pengecer dipasar hingga produk sampai ke tangan konsumen. Sebagai gambaran, berikut skema alur pemasaran yang ada di wilayah tujuh Kabupaten Sukabumi.



Skema ini merupakan urutan pemasaran pertanian yang terjadi di Wilayah tujuh, petani masih memasarkan hasil produksinya kepada konsumen melalui tangan ketiga. Maknanya, petani masih kesulitan dalam menjangkau aksesibilitas pemasaran hasil produksi pertaniannya sendiri.

Kelembagaan pertanian di suatu daerah merupakan aspek yang perlu diperhitungkan pengaruhnya. Sebab, kelembagaan merupakan fasilitator, pembuat regulasi, dan sebagai pengelola suatu bidang. Pembahasan mengenai kelembagaan menjadi suatu keharusan. Karena tanpa kelembagaan, setiap sektor dan komoditas didalamnya tidak akan berjalan sesuai dengan aturan dan tidak terstruktur. Adapun indikator yang menjadi pembahasan pada identifikasi kelembagaan pertanian di wilayah tujuh yaitu jumlah kelas kemampuan kelompok tani, jumlah gapoktan, jumlah BPP, jumlah lembaga keuangan (bank), jumlah koperasi, jumlah kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan lainnya. Jika dibedah, indikator penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu identifikasi kelembagaan petani, kelembagaan keuangan, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan penyuluhan.

Kelembagaan-kelembagaan ini menurut Arifin 2019 dalam (Arsyad et al., 2021), yaitu untuk merealisasikan revolusi pembangunan pertanian 4.0 memiliki syarat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas salah satunya melalui efisiensi kelembagaan sistem rantai hulu hingga hilir. Jadi, kelembagaan pertanian ini sangat menentukan keberhasilan pembanguana pertanian yang didasari oleh level aransemen kelembagaan-kelembagaan pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Potensi kelembagaan pertanian yang teridentifikasi di Wilayah Tujuh Kabupaten Sukabumi terdapat 4 (empat) kelembagaan diataranya kelembagaan petani yang meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan) dan asosiasi komoditas petani. kelembagaan keuangan seperti perbankan dan koperasi, kelembagaan penyuluhan meliputi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), UPTD pertanian dan UPTD Peternakan, dan kelembagaan pemasaran yang masih dikelola secara individu atau perorangan.

Saran

1. Perlu identifikasi potensi kelembagaan lainnya secara luas dan menyeluruh, penelitian ini merupakan penelitian awal maka dari itu pada penelitian selanjutnya diperlukan identifikasi fungsi dan dampak dari kelembagaan yang sudah teridentifikasi terhadap masyarakat.
2. Perlu dilakukan pemanfaatan kelembagaan yang ada dan dilakukan identifikasi pemanfaatan komoditas pertanian, sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi khususnya di Wilayah Tujuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M., Nuddin, A., Fahmid, M., Darmawan, S., Aries, D., Pulubuhu, T., Unde, A. A., Rasyid, A., & Amiruddin, A. (2021). Linkage of Roles Between Institutions for Agricultural Development in Indonesian Border Area. *Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 28(1), 1–16.
- BPS. (2023). *Sukabumi dalam Angka Tahun 2023*. Sukabumi : Badan Pusat Statistik
- Meilani, E. H., Astutiningsih, E. T., Sukmawani, R., & Milla, A. N. (2023). *IDENTIFIKASI KELEMBAGAAN PERTANIAN SEBAGAI SUPPORTING*. 2, 12–16.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sadali, M. I., Alfana, M. A. F., Fajar, K. I. D., & Prianggoro, A. A. (2020). Pengembangan potensi wilayah di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo melalui pemetaan potensi wisata berbasis partisipasi. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.17977/um017v25i12020p001>
- Septiani, E. (2023). Identifikasi Potensi Kelembagaan Pertanian dan Kelembagaan Keuangan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Agribisnis Dan Pembangunan Pertanian (JAPP)*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/10.37150/japp.v1i1.2276>
- Sihombing, Y. (2023). *Inovasi Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan*. 5. <https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.707>
- Undang-Undang no 32. (2004). *Undang-Undang No 32 tentang Pemerintah Daerah* (pp. 1–3).
- Undang-Undang Nomor 25. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (pp. 1–32). [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_0.pdf)
- Veronica, C. (2018). *Aksesibilitas Petani Terhadap Lembaga Keuangan Formal di Kabupaten Mempawah*. *Accessibility of Farmers to Formal Financial Institutions In District Mempawah*.